

# MERANCANG KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT

Oleh:

**Husen Ali Akbar**

*Dosen Tetap pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Nusantara  
husein\_ali@uninus.ac.id*

## Abstrak

*One of strategy for improving the development of national education is strengthen the community aspect through active community participation to become engaged with establishing education . The role of society has been given optimally as educational development subject both locally and nationally. Because society has its own local knowledge reinforcing the future of education. However, the society itself still requires the essential elements to elaborate actively the education development through education way, one is the role of **educators** in intensifying education quality through active participation for all components of society. On the other hand, the education quality needs support, especially increasing awareness, knowledge and skills as social context asset in a society that relies on active participation. Therefore, we need a plan upgrading the education quality so do the quality of its people indirectly.*

## PENDAHULUAN

Saat ini harus diakui bahwa munculnya partisipasi aktif masyarakat dari semua kasta merupakan satu kesadaran bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam menentukan kualitas kehidupan. Sebab pendidikan saat ini tidak lagi terkesan sentralistik. Hal ini sesuai dengan kebijakan otonomi pendidikan di kabupaten/kota sebagai daerah otonomi. Otonomi daerah terjadi ketika pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, dan menempatkan para putra daerah untuk lebih berperan sebagai subjek pembangunan dan mempunyai wewenang tersendiri untuk membuat model jaringan kemitraan serta mampu mengelola pendapatan asli daerah. Tentunya pola ini dibangun melalui pendidikan yang ada di daerah masing-masing.

Tentunya konsekuensi adanya kebijakan bagi peningkatan kualitas pendidikan

tersebut cukup luas. Terutama bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya (SDM), infrastrukturnya, sarana dan prasarana, mendayagunakan sumber daya alam yang belum terolah secara optimal berbasis lokal maupun kondisi pendanaan di daerah.

Pendidikan dalam konteks pembangunan sangat nasional erat kaitannya, namun sayang dalam konteks ini sangat terfokus di pulau Jawa. Sehingga kondisi tersebut masih sangat terlihat adanya kesenjangan pendidikan. Padahal dari hasil pendidikan yang berkualitas akan mendukung pembangunan di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus siap dengan konsekuensi apapun yang menyangkut meningkatkan kualitas pendidikan di daerah melalui partisipasi aktif masyarakatnya.

Pemerintah daerah pun harus berbenah diri dan menyiapkan diri. Selain mempersiapkan parameter-parameter diatas,

yang didukung oleh partisipasi masyarakat, seperti sistem kekerabatan yang masih kuat, nilai-nilai adat, sosial dan keagamaan yang masih melekat kuat. Modal dasar tersebut perlu dikuatkan dan dikembangkan sehingga menjadi suatu penggerak pembangunan berwawasan partisipatif aktif.

Pendidikan adalah lahar untuk membentuk SDM bermoral, yang diyakini oleh semua bangsa di dunia ini, sebab SDM merupakan komponen penting dan utama dalam pembangunan suatu bangsa, tanpa adanya SDM yang mempunyai kesadaran, komitmen, kemauan dan kemampuan maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Melalui hal ini, maka dipandang tepat bahwa pendidikan yang berkualitas melibatkan partisipasi aktif dan sekaligus memberdayakan masyarakat daerah. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan, maka akan berdampak positif untuk membangkitkan kesadaran, komitmen, kemauan dan kemampuan untuk menjadi pionir pembangunan pendidikan nasional.

Dengan terciptanya para pionir di masyarakat diharapkan mereka mampu memobilisasi, menggerakkan dan melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Pada proses selanjutnya dengan adanya gerakan moral tersebut, dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran sosial yang sedemikian besar, yang pada akhirnya pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui partisipasi aktif masyarakat akan terbangun dengan sendirinya. Khususnya pendidikan di tingkat lokal seiring dengan pembangunan pemerintah daerah di era otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dipandang penting rancangan kualitas pendidikan melalui partisipatif aktif masyarakat, sebagai tanggung jawab moral dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kesadaran, komitmen, kemauan dan kemampuan ditingkat implementatif/penerapan dalam

pembangunan dengan dukungan SDM siap berdaya saing sebagai penggerak pembangunan di era otonomi daerah.

## 1. Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat adalah :

1. Membentuk para pionir-pionir yang memahami, mempunyai afeksi, dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan yang berbasis masyarakat.
2. Adanya transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan, kesadaran, komitmen, kemauan, terhadap daya dukung kualitas pendidikan sehingga mampu menunjang kebutuhan SDM berkualitas di daerah masing-masing.
3. Adanya gerakan moral melalui pendidikan dari berbagai komunitas lokal untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di lingkungan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan.

## 2. Metodologi

Untuk merancang desain rencana kerja dalam rangka meningkatkan “kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat,” diperlukan adanya kerangka kerja. Kerangka kerja ini merupakan landasan berpikir dan landasan melakukan aksi moral sosial masyarakat. Ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan agar dalam meningkatkan kualitas pendidikan berjalan sistematis dan benar-benar memperhatikan unsur kearifan lokal serta mempertimbangkan daya partisipasi masyarakat.

Dimensi-dimensi ini terdiri dari *kualitas pendidikan dalam pemberdayaan partisipatif aktif masyarakat*, Pendekatan ini merupakan jawaban dari adanya penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang ditandai dengan pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peluang yang strategis bagi setiap daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Esensi dari Undang-undang tersebut adalah optimalisasi peran dari pemerintah daerah yang selama ini hanya menerima saja apa yang diberikan oleh pusat (sentralistik). Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan mampu memberikan peran penting berdasarkan kebutuhan, permasalahan dan kondisi faktual yang dihadapi.

Namun banyak kendala dalam masyarakat, di antaranya adalah kurangnya para pionir-pionir pemberdayaan. Pionir ini dipandang sebagai ujung tombak dalam pembangunan pendidikan di masyarakat. Pionir ini, bisa jadi dari kalangan tokoh yang ada masyarakat, aparat pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan bahkan pada tingkat kabupaten/kota.

### 3. Pembahasan

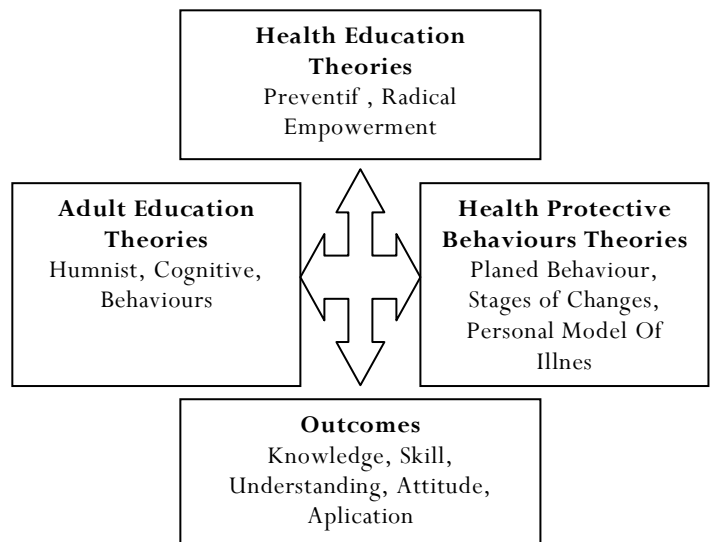
#### 1) Kualitas Pendidikan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara ekstrim pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses memanusiasikan manusia. Membangun masyarakat dari wacana berfikir yang statis tradisional menjadi masyarakat dengan wacana berfikir kosmopolit yang dinamis rasional. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pembangunan masyarakat desa dan kota (*rural and urban community development*). Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, pendidikan keterampilan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain.

Menurut Margono Slamet (1998:1) pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah perilaku manusia. Domain yang

diharapkan berubah meliputi: pertama, domain perilaku pengetahuan (*knowing behavior*), kedua, domain perilaku sikap (*feeling behavior*) dan ketiga, domain perilaku keterampilan (*doing behavior*). Senada dengan Dahama dan Bhatnagar (1980:3), pendidikan itu .....*as the process of bringing desirable change into behavioral change of human being*. Menurutnya komponen-komponen perilaku yang harus berubah meliputi: *Knowledge and ideas, values and attitudes, norms and skills, understanding and translation*, ditambah dengan *goals and confidence*, seperti terlihat di dalam bagan berikut.

**Bagan 1. Behavioral components.**



Kata kunci dari tujuan pendidikan ialah perubahan perilaku. Unsur-unsur perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh peserta didik (*Knowledge*), apa yang dapat mereka lakukan (*Skills*), apa yang mereka rasakan/pikirkan (*Attitudes*) dan apa yang mereka kerjakan (*Action*).

Pada saat ini, Indonesia dihadapkan kepada persoalan multidimensi. Kualitas SDM-nya rendah, cenderung tidak akan mampu memecahkan masalahnya. Berbeda dalam masyarakat masih sangat tinggi. Namun, melalui pola-pola pendekatan

pendidikan, maka mereka memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya, serta mampu merumuskan pola pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam persoalan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

D.P.Tampubolon (2001:7-11), mengemukakan bahwa dengan perkembangan masyarakat industri dan pascaindustri Indonesia akan sekaligus berada di bawah pengaruh empat proses perkembangan

sosial-ekonomi yang mendasar pada abad ke-21, bahkan sesungguhnya sudah mulai dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Keempat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar, perlu dipahami karena dampaknya dapat mempengaruhi seluruh tata kehidupan bangsa Indonesia terutama pada abad ke 21 ini. Keempat proses itu meliputi: (1) globalisasi; (2) industrialisasi; (3) asianisasi; dan (4) sistem informasi canggih, serta dampaknya.

**Tabel 1**

**Akibat Utama Globalisasi, Industrialisasi, Asianisasi, dan Informasi Canggih**

No.	Proses	Akibat Utama
1.	Globalisasi	Keterbukaan
		Demokratisasi
		Persaingan dalam konteks kerja sama
2.	Industrialisasi	Rasionalitas
		Dominan Kecerdasan Intelektual ( KI )
		Sekularisme
3.	Asianisasi	Percaya diri Asia
		Pengaruh budaya Asia ke Barat dan bagian lain dunia
4.	Sistem Informasi Canggih	Kesaratderasan informasi
		Perkembangan KI dan KE
		Simplikasi, fisiensi, dan efektifitas dalam komunikasi
		Bahasa menjadi kebutuhan pokok
		Kemandirian memperoleh pengetahuan
		Perubahan sifat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan keempat proses tersebut, tantangan utama bagi kita ialah bagaimana Indonesia mempersiapkan diri agar keempat proses itu bermanfaat semaksimal mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan mutu kehidupan melalui pendidikan. Namun semua itu kembali kepada pemerintah sejauhmana menunjukkan kemauan politiknya untuk menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didiknya?

Edwin Markam (dalam Lunardi 1984:II) terucap dalam bait sajaknya:

*" Man Making "*

*We Are All Blind Unless We See*

*That In The Human Plan*

*Nothing Is Worth The Making*

*If It Does Not Make The Man*

*Why Build These Cities Glorius*

*If Man Unbuilded Goes?*

*In Vain We Build The Work Unlessthe  
Builder Also Grows*

Sajak di atas menekankan bahwa kita semua buta kecuali kita dapat melihat, bahwa dalam rencana manusia, tiada yang berharga dibangun, apabila manusia tidak dibangun. Segala harga pembangunan akan sia-sia, kecuali SDM pembangun dapat tumbuh dan berkembang. Generasi muda harus diberdayakan melalui pendidikan berkualitas mutu.

## 2. *Partisipasi Aktif Masyarakat*

Harus diakui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara mendasar belum dapat menjawab segala permasalahan yang dialami masyarakat. Kesemua permasalahan tersebut dapat disebabkan di antaranya oleh sistem pelibatan/ partisipasi/ keikutsertaan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi, yang kurang aspiratif. Akibatnya muncul partisipasi yang bukan

berdasarkan kehendak masyarakat, tapi partisipasi yang dipaksakan atau partisipasi karena dimobilisasi (*mobilize partisipation*).

Namun, kita patut pula berbangga selama ini ada satu kesadaran walau belum merata bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sudah nampak berarti, baik dukungan finansial maupun non-finansialnya (akademik, moral, dan sebagainya), baik melalui pendirian lembaga pendidikan formal dan non-formal maupun lembaga lain yang mendukung proses pendidikan nasional.

Wolf, Kane, and Strickland (1997) menegaskan partisipasi masyarakat memiliki sejumlah lima kekuatan, seperti:

- a) Efektivitas proyek meningkat, penggunaan pengetahuan, keterampilan dan sumber dapat memperbaiki desain dan implementasi proyek,
- b) Efisiensi proyek membaik, keterlibatan masyarakat dapat mengarahkan penggunaan sumber eksternal dan lokal yang lebih baik, misalnya material dan tenaga kerja,
- c) Kepercayaan diri dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi mentalitas ketergantungan,
- d) Mencakup anggota masyarakat lebih luas, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan distribusi keuntungan yang lebih merata bagi orang-orang yang terabaikan, misalnya orang miskin, perempuan, minoritas, tak berdaya, dan sebagainya,
- e) Kesenambungan proyek lebih terjamin, keterlibatan masyarakat dapat membantu untuk menjamin bahwa proyek melanjutkan fungsi secara benar.

Partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. White dan Barber (1997) menegaskan bahwa hubungan dan kerjasama yang suportif

antara keluarga dan masyarakat memiliki efek yang positif.

Hal ini didukung oleh penelitian Mortimore dkk (1988) terhadap siswa SLTP bahwa ditemukan keuntungan yang positif di mana orangtua membantu di dalam kelas dan ketika *study-tour*, ada pertemuan tentang kemajuan anak secara rutin, ada sebuah ruang untuk orangtua di sekolah, dan ada suatu kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan orangtua dapat hadir di sekolah kapan saja untuk urusan anaknya.

Masyarakat yang sehat tidaklah mungkin hanya membiarkan pendidikan itu berlangsung apa adanya, karena mereka akan menghadapi resiko yang boleh jadi sangat merugikan. Untuk mencapai masyarakat yang lebih maju, maka masyarakat perlu peduli dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dapat di wilayahnya. Masyarakat perlu merasa bertanggung jawab akan keberadaan pendidikan di wilayahnya, walupun didasari sepenuhnya bahwa pendidikan dasar boleh diklaim sebagai *public-goods* (artinya bahwa utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah).

Untuk dapat mengefektifkan partisipasi aktif masyarakat dalam otonomi pendidikan, maka dapat dilakukan berbagai upaya, yakni: *Pertama*, partisipasi masyarakat perlu didorong sampai pada partisipasi dalam pembuatan keputusan, baik yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan dan program pendidikan di daerah dan sekolah, menyeleksi bahan dan materi pendidikan, substansi yang harus diajarkan, perencanaan anggaran dan monitoring belanja untuk kegiatan pendidikan, dan menseleksi personil di lingkungan institusi dan birokrasi pendidikan.

*Kedua*, masyarakat sharing tanggung jawabnya dalam menciptakan iklim masyarakat dan sekolah yang lebih kondusif bagi terselenggaranya proses pendidikan, misalnya perwakilan masyarakat dapat menjadi tenaga voluntir dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan, organisasi

masyarakat menerima dengan terbuka seluruh staf pendidikan siswa yang mengunjungi fasilitas yang dimiliki masyarakat, dan sebagainya.

*Ketiga*, masyarakat perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan tetap memberikan dukungan yang berarti melalui umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan layanan pendidikan di wilayahnya.

*Keempat*, masyarakat perlu terus mengupayakan dalam mengurangi aliansi sekolah dari masyarakat, karena pada dasarnya sekolah merupakan bagian daripada masyarakat. Kondisi yang demikian diyakini akan meningkatkan prestasi pendidikan peserta didik (Mohrman, Wohlstetter and Associates, 1994).

*Kelima*, perlu adanya fleksibilitas yang berkenaan dengan struktur birokrasi, budgeting, lintas sektor, disain, perencanaan dan implementasi. *Keenam*, memberikan kepercayaan dan investasi bagi masyarakat local dengan memperkuat institusi loka, membangun di atas fundasi lokal, dan sharing informasi.

## KESIMPULAN

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan adalah itikad baik yang perlu dikembangkan oleh semua pihak. Namun hal yang paling penting dan mendasar adalah proses pemberdayaan masyarakat haruslah dimulai oleh masyarakat bersangkutan. Pendekatan partisipatif aktif adalah metode yang sangat efektif ditengah digugatnya kebijakan sentralistik yang selama ini telah berkembang di saat ini.

Akhirnya dapatlah disadari bahwa partisipasi aktif masyarakat bagi kebersihan otonomi pendidikan menduduki posisi yang strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan *stakeholders* pendidikan yang paling utama. Dengan demikian sangatlah tepat, jika masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam

pengambilan keputusan untuk berbagai persoalan yang penting dalam proses pendidikan. Atas dasar pengertian ini, maka otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Thoha, Miftah (2000), *Desentralisasi Pendidikan*, Jakarta : Biro Perencanaan Depdiknas.

White, John and Barber, Michael, Ed. (1997), *Perpectives on School Effectiveness and School Improvement*, London : Institute of Education

## DAFTAR PUSTAKA

Hannaway, Jane and Carnoy, Martin Ed. (1993), *Decentralization and School Improvement: Can We Fulfill the Promise ?* San Fransisco, Jossey-Bass Publishers.

Koentjaraningrat, (1984) *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta.

Mohrman, Ausan Albers. Wohlstetter, Priscilla dkk (1994), *School-Based Management Organizing for high Performance*, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers.

Nurhadi, Muljani A. (2000), *Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengelolaan Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang RI No. 22 dan 25 Tahun 1999*, Jakarta : Biro Perencanaan Depdiknas.

Narwoko, J. Dwi –Bagong Suyanto (ed.), (2004) *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta.

Suharto, Edi, (1997) *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*, LSP-STKS Bandung.

Sumaryadi, I. Nyoman, (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.

Schlechty, Phillip C., (1997), *Inventing Better Schools : An Action Plan for Educational Reform*, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers.